



Sutarmidji

Ingatkan Kadis

Tak Main Mata

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019, kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Yakni, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalbar.

Penyerahan DIPA dan TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN tahun 2019. Acara penyerahan berlangsung di Balai Petiti, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kamis (13/12).

Sutarmidji menyampaikan beberapa arahan dari Presiden RI, terkait penyerahan DIPA dan TKDD tersebut yang menekankan titik fokus pada Anggaran APBN Tahun 2019, mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Midji mengatakan, untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, serta belanja negara yang produktif, maka mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis. Caranya, diarahkan mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi serta penguatan desentralisasi fiskal.

"Titik fokus pada belanja atau kegiatan tahun 2019, ha-

• **Baca Halaman 15**



NANA ARIANTO/SUARA PEMRED

Saran DJPN Wilayah Kalbar untuk Evaluasi Bidang Belanja Negara:

Perbaiki efektivitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan.

Efisiensi operasional pemerintah, baik di pusat mau pun daerah.

Perencanaan anggaran yang lebih matang dan komprehensif oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran.

Perbaiki tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan dana anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa.

SERAHKAN DIPA - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kamis (13/12).



Hal 9 ■ **bupati/walikota**

rus ada peningkatan sumber daya manusia. Alhamdulillah kita Provinsi Kalbar fokus kegiatan kepada pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM,” terang Midji, saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

APBN tahun 2019, mengambil tema “APBN untuk Mendorong investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan SDM.” Hal itu seiring dan sejalan dengan program Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan yang telah menyusun berbagai program kebijakannya, untuk lima tahun kedepan dengan menaikan AP-

BD Provinsi terhadap dua dinas di jajaran pemerintah Provinsi Kalbar, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Untuk dua dinas ini, APBD Provinsi lebih dari 40 persen dan merupakan suatu terobosan. Sedangkan untuk infrastruktur juga, kita ada peningkatan cukup signifikan,” kata Midji.

Ada pun DIPA yang diserahkan sebanyak 527 DIPA, dengan jumlah nilai Rp8,8 triliun, terdiri atas 61 DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah, sejumlah Rp 393 miliar. 466 DIPA Satuan Kerja Intansi Vertikal sejumlah Rp8,4 triliun. Sedangkan pagu DIPA

tahun 2019, per jenis belanja meliputi, Belanja Pegawai sejumlah Rp3,2 triliun, Belanja Barang sejumlah Rp3,8 triliun, Belanja Modal sejumlah Rp1,8 triliun dan Belanja Bantuan Sosial, Rp13,3 miliar.

“Saya mengingatkan kepada kita semua, untuk lebih hati-hati. Kepala dinas di jajaran Provinsi Kalbar, agar lebih hati-hati,” tekan Midji.

Fokus pemerintah adalah pembangunan SDM. Maka tidak boleh main-main dengan anggaran pendidikan dan kesehatan. Ia pun siap terima laporan dari masyarakat, jika ada pungli sebesar apa pun di jajaran pemerintah

Provinsi Kalbar. “Dan saya pastikan akan saya pecat (pelakunya),” tegas Midji lagi.

Di acara penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga memberikan penghargaan kepada 11 pemerintah daerah yang berdasarkan audit BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari 14 kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Melawi, Bengkayang dan Sambas yang tidak mendapatkan predikat WTP ini. **(nak/lis)**